



## **Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia**

**Oleh:**

**Yongky Gigih Prasisko<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Perkembangan masyarakat kontemporer di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan teknologi global ternyata juga ikut berdampak pada munculnya konflik sosial secara khusus. Konflik semacam itu melibatkan kelompok kelas menengah yang memiliki nilai-nilai demokrasi. Di sisi lain, konflik itu juga ikut membentuk dinamika di dalam pergerakan sosial baru. Gerakan sosial baru di Indonesia adalah anak kandung yang lahir dari sistem demokratis dimana partisipasi politik secara langsung dilakukan sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik, khususnya yang dapat menjawab tuntutan atas kesetaraan dan perlindungan bagi hak-hak minoritas. Reformasi 1998 memang menjadi landasan bagi arah pembentukan tradisi demokratis di Indonesia, meski demikian, membutuhkan waktu hampir enam tahun lamanya setelah 1998 dimana demokrasi secara langsung diterapkan melalui sistem elektoral yakni pada saat PILPRES di tahun 2004. Dengan kata lain, transisi Indonesia menuju suatu bangsa yang demokratis masih harus terus mengembangkan beragam bentuk partisipasi politik.

### **Kata Kunci:**

Gerakan sosial baru, reformasi 1998, transisi demokratis di Indonesia

### **Abstract**

The development of contemporary Indonesian society along with the advance of global technology has also resulted in a particular new form of social conflict. Such

conflict involved new middle class Indonesian whose values are influenced by democracy. On the other hand, the conflict has shaped the dynamics of this new social movements. New social movement in Indonesia can be said as a child that was born from the a democratic system that requires direct participation in order to shape public policy, especially that provide the demands of equality and the protection of minority rights. The 1998 reform is the foreground to establish a new round of democratic tradition in Indonesia; however, it took six years later after 1998 that direct democracy in the electoral system in Indonesia was first established in the 2004 presidential election. In other words, Indonesia's transition to a democratic nation still expands other new forms of political participation.

### **Keywords:**

New Social movement, 1998 reform, Indonesia's democratic transition

### **Pengantar: Gerakan Sosial dan Sosiologi**

Pada akhir tahun 1960an, masyarakat global mengalami transformasi besar dan dramatis, atau beberapa bisa disebut sebagai revolusi. Gerakan hak sipil dan anti-perang di Amerika, demonstrasi 1968 di Prancis, protes mahasiswa di Jerman, Inggris atau Meksiko, koalisi buruh-mahasiswa 'Hot Autumn' 1969 di Itali, aksi pro demokrasi menentang Francoisme Madrid dan Komunisme Prague, tumbuhnya paham Katolikisme kritis dari Amerika Selatan sampai Roma, gerakan lingkungan dan perempuan, telah berperan membentuk politik baru di tahun 1970an. Fenomena ini menandakan perubahan besar terjadi secara global.

Jika pada akhir 1940an, gerakan sosial kurang mendapat deskripsi pemahaman dan kerangka teoritik, maka pada akhir 1960an gerakan sosial mulai menjadi fokus dalam studi perubahan sosial. Riset gerakan sosial sebagai aksi kolektif, pada pertengahan 1970an, menjadi salah satu

---

<sup>1</sup>Yongky Gigih Prasisko adalah alumni Fakultas Filsafat dan Program Studi Kajian Budaya, Sekolah Pascasarjana UGM.



bidang kajian penting dalam sosiologi.<sup>2</sup> Salah satunya yakni pendekatan interaksionisme simbolik yang lekat dengan aliran Chicago, yang mengembangkan analisis perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai bidang kajian sosiologi. Para penggagasnya, E. Park dan Ernest W. Burges, menekankan bahwa fenomena kolektif tidak serta merta mencerminkan krisis sosial, tetapi lebih kepada usaha memproduksi norma dan solidaritas baru, serta melihat gerakan sosial sebagai mesin perubahan sistem nilai. Perilaku kolektif kemudian dikembangkan oleh tokoh seperti Herbert Blumer, Ralf Turner dan Lewis Killian. Mobilitas penduduk, organisasi dengan skala luas, perkembangan teknologi, komunikasi massa dan penolakan terhadap nilai tradisi menjadi pemicu pencarian pola atau sistem organisasi sosial baru. Perilaku kolektif merupakan perilaku yang berkaitan dengan perubahan dan gerakan sosial merupakan bagian integral dari *status quo* dan proses transformasinya.<sup>3</sup> Pendekatan lain; struktural-fungsional Neil Smelser (1964) yang mencoba menjelaskan gerakan sosial sebagai efek samping dari transformasi sosial yang pesat. Menurutnya, dalam sistem yang sudah mapan, perilaku kolektif menjadi tegang di mana mekanisme sistem yang stabil tak mampu beradaptasi dengan cepat. Pada saat transformasi sosial bergerak cepat dan berskala luas, ikatan kolektif seperti - agama, masyarakat inklusi, sekte politik, utopian ekonomis - mengalami guncangan makna, yang menunjukkan ketidakmampuan institusi dan mekanisme kontrol sosial untuk mereproduksi ikatan sosial. Gerakan sosial merupakan reaksi masyarakat terhadap situasi krisis yang menginginkan basis baru bagi ikatan sosial.<sup>4</sup> Pendekatan Blumer cenderung menekankan faktor psikologis, mengabaikan konteks di mana gerakan sosial muncul. Sedangkan Neil Smelser

menekankan faktor struktural, mengesampingkan agensi dan kurang interpretatif.

### Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial baru muncul seiring dengan perubahan bentuk masyarakat. Perkembangan masyarakat kekinian tentu juga menjadi pertimbangan perihal bagaimana mengamati bentuk gerakan sosial yang muncul, strategi yang digunakan, serta visi dan perubahan yang ingin dicapai. Para teroretikus sosial juga telah mengembangkan pemikirannya dalam merumuskan masyarakat kontemporer. Alain Touraine menyebut masyarakat kekinian sebagai masyarakat terprogram (*programmed society*), Daniel Bell memakai istilah masyarakat Post-Industri, Jean Baudrillard menyebutnya sebagai masyarakat postmodern, Jean-François Lyotard menggunakan istilah masyarakat terkomputerisasi (*computerized society*), Anthony Giddens punya istilah kapitalisme lanjut. Pada intinya, pemikiran mereka menyebut adanya pengaruh perkembangan teknologi, kapitalisme dan industri yang eksekif terhadap kebudayaan masyarakat.

Bentuk masyarakat dan relasi sosial tentu juga semakin kompleks. Touraine mengidentifikasi ada empat tipe masyarakat berdasarkan ciri antagonismenya yakni masyarakat agraris, merkantilis, industri dan terprogram. Keempat tipe tersebut cenderung tidak disebut sebagai progres atau evolusi masyarakat, tetapi mereka diandaikan bisa saling tumpang tindih. Antagonisme dalam masyarakat agraris adalah antarpekerja dan tuan tanah. Merkantilisme antarbudak dan saudagar. Dalam masyarakat industri yang berkonflik adalah kelas buruh dan pemodal. Sedangkan dalam masyarakat yang terprogram, antagonismenya lebih kompleks.<sup>5</sup> Ciri khas dalam masyarakat

---

<sup>2</sup>Porta dan Diani, *Social Movement: An Introduction (Second Edition)*, Oxford: Blackwell Publishing, (2006), hlm. 1.

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 12

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 7

---

<sup>5</sup>Alain Touraine, *The Workers Movement*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), hlm. 127



terprogram adalah produksi hal simbolik atau kultural yang membentuk atau mentransformasikan representasi esensi manusia dan dunia eksternal. Gagasan Touraine bermaksud mengenali tipe (cara) produksi baru, kekuatan baru dan konflik sosial baru dalam masyarakat kontemporer.

Kekuatan baru yang bisa diidentifikasi adalah kelompok yang lahir dari pertumbuhan sektor jasa, serta produksi pengetahuan/informasi yang melimpah. Mereka eksis sebagai profesional karena level pendidikannya. Mereka memiliki kemampuan memproduksi pengetahuan atau informasi untuk memaknai hal tertentu. Kemampuannya dalam hal kultural membuatnya kerap beraktivitas berdasarkan identifikasi atau sistem makna tertentu. Konflik sosial dalam hal ini cenderung berkuat di persoalan produksi dan sirkulasi pengetahuan atau informasi, kondisi sosial berbasis produksi dan penggunaan pengetahuan atau informasi, dan konstruksi makna kaitannya dengan identitas personal maupun kolektif.<sup>6</sup>

Aktor sosial yang berkonflik yakni mereka yang memiliki orientasi kultural yang berbeda, dalam seperangkat kultural yang membentuk ketimpangan relasi sosial diantara mereka. Mereka berjuang dalam arena produksi kultural, mengubah seperangkat sistem makna, yang melaluinya relasi sosial dimapankan. Touraine menyebut konflik sosial baru ini yakni antara kebijakan struktur ekonomi-politik dengan partisipasi terhadapnya (kebijakan negara dan partisipasi publik), atau kelompok masyarakat yang marjinal dengan yang dominan.<sup>7</sup> Gerakan sosial baru merupakan fenomena yang muncul dalam konflik sosial baru tersebut. Gerakan sosial baru memiliki beberapa ciri antara lain:

- (1) Memiliki partisipan yang plural dari segi umur, gender, orientasi seksual atau profesi.
- (2) Tak lagi menggunakan ideologi sebagai alat pemersatu perjuangan, tetapi cenderung menggunakan identitas dan nilai kultural yang beragam. Ia cenderung menuntut reformasi institusi untuk memperbesar partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Mereka menginginkan demokratisasi kehidupan, dan menghapus dimensi politik di masyarakat.
- (3) Cenderung menggarap isu kultural yang berkaitan dengan identitas, seperti kepercayaan, nilai, simbol dan makna yang menjadi sentimen solidaritas bersama, yang membedakannya dengan kelompok sosial lain.
- (4) Relasi antarindividu dan kelompok tidak jelas. Beberapa gerakan sosial kontemporer bersifat aksi individu atau personal. Seperti gerakan hak perempuan atau gay. Gerakan sosial baru juga tidak memiliki basis dan struktur yang kaku. Beberapa gerakan merupakan gerakan penegasan diri. Contoh seperti gerakan dalam peristiwa Mei 1968 di Perancis.
- (5) Gerakan sosial baru kerap melibatkan aspek intimasi dan perasaan manusia. Seperti gerakan kesehatan atau anti-rokok, gerakan transformasi diri termasuk mengubah perilaku fisik atau seksual. Ia bahkan berpengaruh sampai pada kehidupan sehari-hari: apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita nikmati.
- (6) Gerakan sosial baru menunjukkan pola mobilisasi anti-kekerasan dan pembangkangan yang menantang norma dominan dengan aksi pertunjukan dramatis.
- (7) Pengorganisasian dan penyebaran kelompok gerakan sosial baru berhubungan dengan krisis penyaluran partisipasi publik dalam

<sup>6</sup> Porta dan Diani, *Social Movement: An Introduction (Second Edition)*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), hlm. 52-56

<sup>7</sup> Alain Touraine, *The Postindustrial Society*, (New York: Random House, 1971), hlm. 9.



sistem demokrasi. Krisis ini merupakan faktor motivasi bagi aksi kolektif dalam pencarian bentuk alternatif partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.

- (8) Gerakan sosial baru bersifat desentral, tersegmentasi dan menyebar. Bentuknya bervariasi tergantung kebijakan otoritas lokal. Diskusi dan perdebatan perihal kebijakan kerap mengukuhkan otonomi otoritas lokal terhadap otoritas nasional.<sup>8</sup>

### **Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998**

Perkembangan zaman turut mempengaruhi bagaimana gerakan dan aktivisme diorganisir untuk memperkuat keefektifannya. Namun ia juga kerap mendapat dukungan yang tidak direncanakan sebelumnya. Perkembangan media dan kemajuan teknologi informasi kerap terlibat dalam perjuangan sebuah gerakan. Semisal gerakan reformasi 1998. Hotman Siahaan, guru besar Universitas Airlangga Surabaya, mengatakan bahwa televisi secara langsung atau tidak langsung telah “memberi inspirasi kepada gerakan mahasiswa untuk ikut turun ke jalan...” Secara spesifik, Hotman, yang kala itu terlibat langsung dalam mobilisasi gerakan mahasiswa di Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa berita “Liputan 6” SCTV menjadi referensi paling layak bagi mahasiswa dalam merumuskan isu yang harus dilontarkan dalam aksi demonstrasi (pro Reformasi) di Surabaya.<sup>9</sup> Pada periode 1990an media, khususnya televisi swasta, mulai berkembang di Indonesia. Ia secara

langsung atau tidak langsung, direncanakan atau tidak, tak dapat dipungkiri turut mendorong laju gerakan reformasi Indonesia.

Tentu ada banyak faktor pemicu atau pendorong gerakan reformasi 1998. Yang perlu ditilik terkait dengan perkembangan industri, teknologi dan kapitalisme di zaman kontemporer adalah terbentuknya satu kelas baru. Ariel Heryanto mengidentifikasi adanya orang kaya baru (*new rich*) di Indonesia yang turut mengkonstruksi budaya dan kontestasi identitas kelompok, melalui budaya konsumsi, yang kemudian disebutnya sebagai kelas menengah (baru).<sup>10</sup> Ariel berpendapat bahwa konsumerisme dan konsumsi yang tinggi turut memainkan peranan penting dalam politik kultural Indonesia kontemporer. Kelas menengah baru itu diantaranya adalah kalangan alumni dari berbagai kampus, yang perannya dalam gerakan reformasi 1998, tak bisa diabaikan. Mereka terutama terdiri dari kalangan profesional berusia di atas 40an. Sebagian besar adalah “mantan” aktivis mahasiswa 1970/1980an. Karena situasi krisis ekonomi, sebagian dari mereka menderita karena bisnis yang anjlok atau bangkrut. Tidak ada pilihan lain, kecuali menengok gerakan mahasiswa sebagai alternatif untuk memperbaiki keadaan, baik karena motif-motif pribadi yang dilatari oleh kondisi ekonomi tersebut, maupun motif idealisme sisa-sisa masa mereka aktif dalam aktivisme politik tahun-tahun 1970an dan awal 1980an. Apapun latar belakangnya, pada akhirnya mereka “turun gunung” dan bergabung dengan mahasiswa. Beberapa kelompok mahasiswa bahkan mengendalikan, khususnya melalui bantuan finansial pada gerakan mahasiswa.<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Hank Johnston, Enrique Larana dan Joseph R. Gusfield, “Identities, Grievances and New Social Movements”, dalam Hank Johnston dkk. (Ed), *New Social Movement: From Ideology to Identity*, (Philadelphia: Temple University Press, 1994), hlm. 6-9

<sup>9</sup> Ishadi SK, *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), hlm. 75

<sup>10</sup> Ariel Heryanto, “The Years of Living Luxuriously: Identity Politics of Indonesia’s New Rich”, dalam Michael Pinches (Ed), *Cultures and Privilege in Capitalist Asia*, (London: Routledge, 1999), hlm. 159.

<sup>11</sup> Hermawan Sulistyono, “Historiografi 1998 Revisited”, dalam AE Priyono dan Usman Hamid



Tentang kelas menengah juga tidak tunggal. Eep Saefulloh Fatah, dalam konteks gerakan reformasi 1998, menyebut bangkitnya 'kelas menengah politik', yakni anggota kelas terdidik di perkotaan yang menjadikan kritisisme sebagai basis politik mereka. Kelas menengah politik berbeda dari konsep kelas menengah yang lazim dalam ilmu sosial. Kelas menengah membangun daya tawarnya *vis a vis* negara melalui modal. Kelas menengah politik membangun daya tawarnya melalui intelektualitas dan organisasi politik. Merekalah yang menguatkan atau mengeraskan gerakan sosial pada konteks reformasi 1998. Mereka memiliki daya tawar berupa moralitas untuk membangun sistem atau wacana masyarakat baru.<sup>12</sup>

Daya tawar wacana dan moralitas baru dari kelompok kelas menengah politik bisa dilihat dari tuntutan reformasi. Secara praktis, jika direkapitulasi, ada 6 tuntutan reformasi antara lain:

- (1) Penegakan supremasi hukum
- (2) Pemberantasan KKN. Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN
- (3) Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya.
- (4) Amendemen konstitusi. Upaya amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 tidak hanya memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang hasil amendemen keempat UUD 1945 sehingga perubahan lebih komprehensif guna mewujudkan cita-cita negara yang ingin dicapai.
- (5) Pencabutan dwifungsi TNI/Polri

---

(Ed), *Merancang Arah Baru Demokrasi : Indonesia Pasca-Reformasi* (Jakarta: KPG, 2014)

<sup>12</sup> Eep Saefulloh Fatah, *Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. xxx

- (6) Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Konsep Otonomi Daerah Yang Dilakukan Oleh Negara Indonesia.

Secara konseptual, inti tuntutan tersebut adalah demokratisasi dan desentralisasi sistem. Jean Couteau membandingkan gerakan reformasi 1998 dengan demonstrasi di Perancis 1968. Keduanya sama-sama menuntut demokratisasi dan desentralisasi sistem, serta membongkar kontradiksi sosial dan politik dalam negara kapitalis. Perbedaannya, demonstrasi Perancis 1968 membongkar kontradiksi tersebut dengan menelanjangi operasi struktural-sistemik dalam masyarakat seperti nilai tradisi keluarga, alienasi buruh, konsumerisme dan invasi media massa melalui jalur politik. Sedangkan reformasi 1998 membongkar kontradiksi dengan langsung menelanjangi sistem politik – represi rezim Soeharto, dan sistem sosio-ekonomik – lembaga-lembaga negara yang KKN. Akibatnya gerakan protes ini kelabakan, tuntutan demokratisasi kurang didukung dengan tawaran wacana untuk menghapus operasi sistemik. Operasi sistem kapitalisme, nilai tradisi, agama tidak dipertanyakan.<sup>13</sup> Maka dari itu, identitas agama, pemodal, feodal masih tetap eksis dalam kursi politik. Maka yang ditawarkan adalah reformasi yang berarti partisipasi demokratis dalam sistem kapitalis, yang melibatkan partisipan-partisipan yang masih memegang teguh nilai tradisi, agama dan kapital.

Dalam hal strategi, bentuk pengorganisasian gerakan reformasi tidak berdasar pada struktur organisasi yang terdiri dari divisi-divisi kerja. Strategi yang diterapkan mahasiswa adalah pembentukan kelompok-kelompok aksi, di bawah berbagai nama dan

---

<sup>13</sup>Jean Couteau, "Gerakan Mei 1968" (pangantar), dalam Patrick Seale dan Maureen McConville, *Pemberontakan Mahasiswa: Revolusi Perancis Mei 1968*, penerjemah Denny B.C. Hariandja, Cetakan 1, (Yogyakarta: Yayasan Litera Indonesia, 2000), hlm. xlvi-xlvii.



bendera, antara lain yang di Jakarta : FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta), Forkot (Forum Kota), Famred (Front Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi), yang jumlah massanya mencapai ribuan. Sebagai “kelompok aksi,” kepemimpinan bersifat egaliter, non-permanen, dan sangat longgar. Suatu strategi kepemimpinan massa yang cukup efektif, karena, misalnya, tidak ada yang bisa mengklaim kepemimpinan formal. Klaim kepemimpinan biasanya merupakan sumber perpecahan kelompok, karena berkaitan dengan eksistensi individual pemimpin maupun faksi-faksi di dalam suatu kelompok.<sup>14</sup>

### **Demokratisasi di Indonesia Melalui Gerakan Sosial Baru**

Gerakan reformasi 1998 bisa dikatakan membuka pintu demokratisasi dan desentralisasi sistem di Indonesia. Meskipun sistem demokrasi langsung baru diterapkan tahun 2004. Juga, meskipun sistem demokrasi diinstal pada ‘folder’ feodalisme, kapitalisme, agama dan tradisi. Kita bisa melihat bagaimana dalam sistem demokrasi di Indonesia masih ada sistem feodal/tradisi seperti di Yogyakarta dan Solo, serta ada juga sistem syariah seperti di Aceh. Tetapi setidaknya, gerakan sosial baru perlahan muncul sebagai efek demokratisasi dan dorongan kepada bentuk demokrasi yang kerap disebut sebagai demokrasi langsung.

Dalam demokrasi langsung, gerakan sosial baru merupakan agen perubahan. Secara umum gerakan sosial muncul sebagai bentuk ketidakpuasan dengan kebijakan yang ada. Bentuk keberhasilan gerakan sosial ditentukan dari sejauh mana perubahan kebijakan mampu mengakomodasi tuntutan atau partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Gerakan sosial menegaskan demokrasi langsung yang dianggap lebih dekat dengan kepentingan publik daripada demokrasi liberal, yang berbasis delegasi untuk

representasi rakyat yang hanya bisa dikontrol saat pemilihan, dan demokrasi terorganisir yang berbasis mediasi oleh partai politik. Demokrasi langsung bersifat partisipatoris, otoritasnya didelegasikan untuk isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik, dengan syarat tuntutan kesetaraan dan perlindungan hak demokratis untuk minoritas. Ia bersifat desentral dan menekankan kebijakan atau keputusan mesti diambil sedekat mungkin dengan kehidupan rakyat.<sup>15</sup> Gerakan Bali tolak reklamasi menuntut pembatalan Pepres No 51 tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Gerakan selamatkan rembang (*SaveRembang*) menuntut pembatalan izin-izin pertambangan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Gerakan sosial merupakan bentuk pembukaan ruang-ruang dalam penyaluran aspirasi publik sebagai bentuk proses demokratisasi. Bagaimana dengan pembukaan ruang seperti dalam gerakan Koin Peduli Prita, gerakan kawan-kawan *change.org* atau yang terbaru gerakan donasi untuk ibu Saeni? Ada pembukaan ruang virtual dalam sebuah gerakan. Bagi Porta dan Diani, ada perbedaan antara gerakan konsensus dengan gerakan konfliktual/gerakan sosial. Gerakan konsensus seperti donasi, atau relawan sosial, merupakan aksi kolektif yang tidak mengandung elemen konflik, dalam arti konflik struktur sosial. Gerakan konsensus tidak mensyaratkan lawan yang spesifik. Solusi yang dituntut bukan perubahan distribusi kekuasaan atau perubahan struktur sosial, tetapi fokus kepada pelayanan yang bersifat publik, swadaya, serta pemberdayaan personal maupun komunal. Sedangkan gerakan sosial memiliki ciri:

- (1) Terlibat dalam relasi konfliktual dengan lawan yang spesifik.
- (2) Hubungan dibentuk oleh jaringan informal yang solid.

<sup>14</sup> Hermawan Sulisty, *ibid*,

<sup>15</sup> Porta dan Diani, *ibid*, hlm. 229-240



### (3) Berbagi identitas bersama.

Perbedaannya lagi, gerakan sosial baru memiliki karakter utama yakni protes publik yang damai/non-kekerasan, yang membedakannya dengan gerakan politik melalui jalur partisipasi publik konvensional seperti voting atau lobi dalam perwakilan politik.<sup>16</sup>

Strategi gerakan sosial baru turut memunculkan nilai dan bahasa simbolik tertentu. Kalau di Barat, nilai-nilai yang digunakan dalam gerakan sosial adalah wacana untuk membongkar opresi modern seperti kapitalisme, tradisi keluarga, seksualitas, agama atau media massa. Sehingga wacana yang muncul adalah feminisme, liberalisme, neo-marxist. Sedangkan gerakan sosial baru di Indonesia yang belum tuntas membongkar opresi kultural, justru menggunakan nilai opresi kultural seperti nilai-nilai tradisi sebagai titik tolak perjuangannya, serta sebagai koheisi solidaritasnya. Nilai kultural yang opresif bagi Barat, sebaliknya digunakan oleh gerakan sosial Indonesia untuk membongkar opresi ketidakadilan. Gerakan selamatkan Rembang memunculkan nilai/filosofi kejawen perihal hubungan antara manusia dengan alam. Gerakan Bali tolak Reklamasi memunculkan nilai-nilai adat seperti *puputan* (perang habis-habisan sampai mati).

Peran media, khususnya kemajuan teknologi informasi, tak bisa diabaikan dalam proses perjuangan gerakan. Kehadiran media sosial seperti facebook atau twitter memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi gerakan, promosi, diskusi publik. Media sosial seakan-akan sudah menjadi bagian dari setiap gerakan sosial baru. Pembukaan ruang virtual dalam hal ini bersifat komplementer dengan aksi konkrit di lapangan. Gerakan Bali Tolak Reklamasi dan Gerakan Selamatkan Rembang turut menggunakan ruang virtual [change.org](http://change.org)

untuk menggalang dukungan melalui petisi, serta menggunakan media sosial sebagai promosi dan konsolidasi gerakan di lapangan.

Proses demokratisasi, menurut Heru Nugroho, bisa dilakukan melalui dua fokus. Pertama kompetisi, kedua partisipasi.<sup>17</sup> Proses demokratisasi melalui gerakan sosial baru bergerak di jalan partisipasi, yang mendorong peningkatan jumlah warga yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Hak-hak warga yang diperjuangkan kaitannya dengan gerakan sosial baru antara lain perjuangan untuk membuat subyek penguasa berhubungan dengan kehendak para pemilih atau publik dan perjuangan bagi terciptanya emansipasi bagi sekelompok masyarakat marginal yang masih bergantung pada kelompok dominan.

### Penutup

Reformasi 1998 merupakan pintu masuk menuju babak baru tradisi demokrasi Indonesia. Agenda selanjutnya lebih panjang dan tak mudah, yakni proses mengubah tatanan yang tradisional menjadi demokratis. Proses demokratisasi Indonesia menempuh jalan terjal karena masih belum menuntaskan opresi-opresi tradisional. Demokratisasi di Indonesia cenderung mengarah ke demokratisasi kapitalisme, demokrasi feodalisme dan demokratisasi agama. Nilai-nilai tradisi tidak dipertanyakan, hanya mengalami demokratisasi dengan masih memegang teguh nilai-nilai tradisi. Setidaknya hal ini tercermin dari bentuk gerakan sosial baru di Indonesia.

Gerakan sosial baru di Indonesia berbeda dengan model Barat karena mereka lahir dalam konteks yang berbeda pula. Gerakan sosial baru di Barat menggunakan wacana pembebasan terhadap opresi kultural dan

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 20-23.

<sup>17</sup>Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia", Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 Mei 2012, hlm 3-4.



tradisional. Sedangkan di Indonesia gerakan sosial baru justru menggunakan nilai-nilai kultural dan tradisional untuk melawan dominasi, kebijakan pemerintah yang opresif. Tentu ini baru pengamatan awal. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menelusuri gerakan sosial baru Indonesia yang memiliki kompleksitas kultural dan konteks yang berbeda dengan Barat, tetapi memiliki semangat yang sama dalam menghapus ketertindasan, ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Gerakan sosial Indonesia tak lepas dari bentuk dan proses demokratisasi di Indonesia, yang di dalam sistem demokrasi mengandung partisipan-partisipan tradisional. Gerakan sosial di Indonesia melawan para partisipan tradisional ini dengan jalur partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah.

#### Daftar Pustaka

- Couteau, Jean, "Gerakan Mei 1968" (pengantar), dalam Patrick Seale dan Maureen McConville.(2000).*Pemberontakan Mahasiswa: Revolusi Perancis Mei 1968*, penerjemah Denny B.C. Hariandja, Cetakan 1, Yogyakarta: Yayasan Litera Indonesia.
- Fatah, Eep Saefulloh.(1998).*Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heryanto, Ariel, "The Years of Living Luxuriously: Identity Politics of Indonesia's New Rich, dalam Michael Pinches (Ed).(1999).*Cultures and Privilege in Capitalist Asia*, London: Routledge.
- Ishadi SK. (2014).*Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Johnston, Larana dan Gusfield,"Identities, Grievances and New Social Movements", dalam Johnston. Hank dkk (Ed). (1994). *New Social Movemnet: From Ideology to Identity*, Philadelphia: Temple University Press.
- Nugroho, Heru. (2012). "Demokrasi dan Demokratisasi:Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia", Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 Mei 2012.
- Porta dan Diani. (2006). *Social Movement: An Introduction (Second Edition)*, Oxford: Blackwell Publishing.
- Sulistyo, Hermawan, "Historiografi 1998 Revisited", dalam AE Priyono dan Usman Hamid (Ed). (2014). *Merancang Arah Baru Demokrasi : Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: KPG.
- Touriane, Alain(1987). *The Workers Movement*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Touriane, Alain. (1971).*The Postindustrial Society*, New York:Random House.